



PANGKALAN PENGAWASAN SUMBERDAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA

# LAPORAN **KINERJA** TRIWULAN III TAHUN 2024



## KATA PENGANTAR

---

Sebagai salah satu tahapan dalam siklus manajemen dalam sebuah organisasi, pelaporan mempunyai peran penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pencapaian tujuan dari organisasi. Fungsi pelaporan semakin penting seiring adanya kebijakan sistem anggaran berbasis kinerja dan berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah.

Memperhatikan hal tersebut, dan dalam rangka perwujudan *good governance* diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan serta saran yang telah ditetapkan.

Dengan adanya laporan kinerja (LKj) triwulan III tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan di Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta dalam melaksanakan program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan diharapkan dapat membuka pemikiran lebih kreatif dari berbagai pihak tentang bagaimana meningkatkan peran dan kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta masa yang akan datang.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan Negara tentu saja laporan kegiatan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Jakarta, 15 Oktober 2024

Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta



Akmadon, S.Pi, M.M

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Maksud dan Tujuan .....	3
1.3. Isu Aktual Pengawasan SDKP Jakarta .....	3
1.4. Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Jakarta .....	3
1.5. Wilayah Kerja.....	5
1.6. Armada Kapal Pengawas dan Speedboad Pengawas .....	6
1.7. Kepegawaian .....	8
1.8. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja .....	9
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024.....	11
2.2. Rencana Strategis Pangkalan PSDKP Jakarta .....	11
2.3. Rencana Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun Anggaran 2024 .....	13
2.4. Perjanjian Kinerja.....	15
2.5. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Capaian Sasaran Strategis Pangkalan PSDKP Jakarta.....	18
3.2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2024.....	18
3.3. Analisis Pencapaian Kinerja .....	21
3.3.1 Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif .....	21
3.3.2 Sasaran Kegiatan 2. Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif .....	21
3.3.3 Sasaran Kegiatan 3. Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan .....	26
3.3.4 Sasaran Kegiatan 4. Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan dan pemanfaat sumber daya kelautan.....	27
3.3.5 Sasaran Kegiatan 5. Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan.....	29
3.3.6 Sasaran Kegiatan 6, Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan .....	30

3.3.7 Sasaran Kegiatan 7, Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas .....	32
3.3.8 Sasaran Kegiatan 8, Tata Kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP ...	33
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	45

#### **BAB IV. PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....	47
4.2. Rekomendasi.....	47

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pembagian Satwas SDKP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta .....	6
Tabel 2.	Data Armada Kapal Pengawas.....	7
Tabel 3.	Data Armada Kapal Pengawas Tipe RIB .....	7
Tabel 4.	Data Armada Kapal Pengawas Tipe <i>Speedboat</i> .....	7
Tabel 5.	Data Pegawai Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta .....	8
Tabel 6.	Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2024 .....	15
Tabel 7.	Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Jakarta.....	18
Tabel 8.	Perhitungan Nilai Indeks Operasi Kapal Pengawas .....	22
Tabel 9.	Rekapitulasi Capaian IKU Indeks Kinerja Kapal Pengawas .....	22
Tabel 10.	Rekapitulasi Capaian IKU Indeks Kinerja <i>Speedboat</i> .....	24
Tabel 11.	Nilai indeks kinerja operasi <i>speedboat</i> triwulan III tahun 2024.....	24
Tabel 12.	Capaian Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas .....	25
Tabel 13.	IKU Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai) .....	28
Tabel 14.	Perhitungan IKU "Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan".....	30
Tabel 15.	Rekapitulasi IKU "Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan" triwulan III tahun 2024.....	31
Tabel 16.	Indeks sanksi administratif triwulan III tahun 2024.....	34
Tabel 17.	Rekapitulasi Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan triwulan II tahun 2024.....	35
Tabel 18.	IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO triwulan III tahun 2024.....	37
Tabel 19.	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) triwulan III tahun 2024 .....	38
Tabel 20.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) triwulan III tahun 2024.....	42
Tabel 21.	Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta per Kegiatan sampai dengan Bulan Maret 2024.....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi lingkungan Pangkalan PSDKP Jakarta .....	4
Gambar 2. Peta sebaran wilayah kerja lingkungan UPT Pangkalan PSDKP Jakarta.....	5

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi Jumlah Pegawai Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta.....	8
Grafik 2. Rekapitulasi kegiatan kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan.....	28
Grafik 3. Rekapitulasi Kegiatan yang Mendukung Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan/atau Pemanfaat Sumber Daya Perikanan.....	31

# **BAB I. PENDAHULUAN**



## **1.1 Latar Belakang**

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki 3 pilar utama dalam mewujudkan Laut sebagai Masa Depan Bangsa. Pencapaian ketiga pilar tersebut dilaksanakan melalui misi Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan. Ketiga misi tersebut dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang integral. Pilar kesejahteraan hanya bisa tercapai apabila pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara berdaulat dan berkelanjutan. Penjabaran ketiga misi tersebut dituangkan dalam program/kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja lingkup KKP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari KKP yang diberikan tugas dan fungsi melaksanakan misi Kedaulatan yakni dengan penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2020-2024.

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta (Pangkalan PSDKP Jakarta) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Ditjen. PSDKP dalam melaksanakan misi kedaulatan. Peran tersebut secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta 2020-2024.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selanjutnya pengelolaan kinerja di KKP diatur melalui

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan pengukuran kinerja setiap triwulan dan melaporkannya secara rutin kepada Direktur Jenderal PSDKP.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja (LKj) triwulan III tahun 2024 Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) triwulan III tahun 2024 adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Pangkalan PSDKP Jakarta selama kurun waktu Januari – Juni 2024 dengan dasar hasil evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja pengawasan SDKP.

## **1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP Jakarta**

Isu strategis Pengawasan SDKP terkait beberapa kebijakan, yakni :

- a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan (SDK) berbasis resiko;
- b. Pengawasan Sumber Daya Perikanan (SDP) berbasis resiko;
- c. *Destructive Fishing* berupa penggunaan bom, bius, dan penyetruman kerap terjadi di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta;

- d. Penangkapan dan distribusi ikan yang dilindungi (*Cites*) yang tidak memiliki dokumen perizinan;
- e. Kegiatan peredaran lobster, kepiting dan rajungan yang tidak sesuai ketentuan PERMEN KP Nomor 12 Tahun 2020;
- f. Pemanfaatan ruang laut yang harus dilengkapi oleh PKKPR di Kementerian Kelautan Perikanan (KKP)

Dengan adanya isu aktual tersebut diharapkan kegiatan Pangkalan PSDKP Jakarta selama tahun 2023 dapat mempunyai peran untuk meningkatkan tertib pelaksanaan perundang-undangan.

#### **1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Jakarta**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dalam hal wilayah kerja pengawasannya Pangkalan PSDKP Jakarta memiliki tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan ;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang tercantum pada pasal 6 ayat 1 yaitu

susunan Organisasi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas :

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapannya. Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional adalah memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada gambar dibawah ini:

## 1.5 Wilayah Kerja

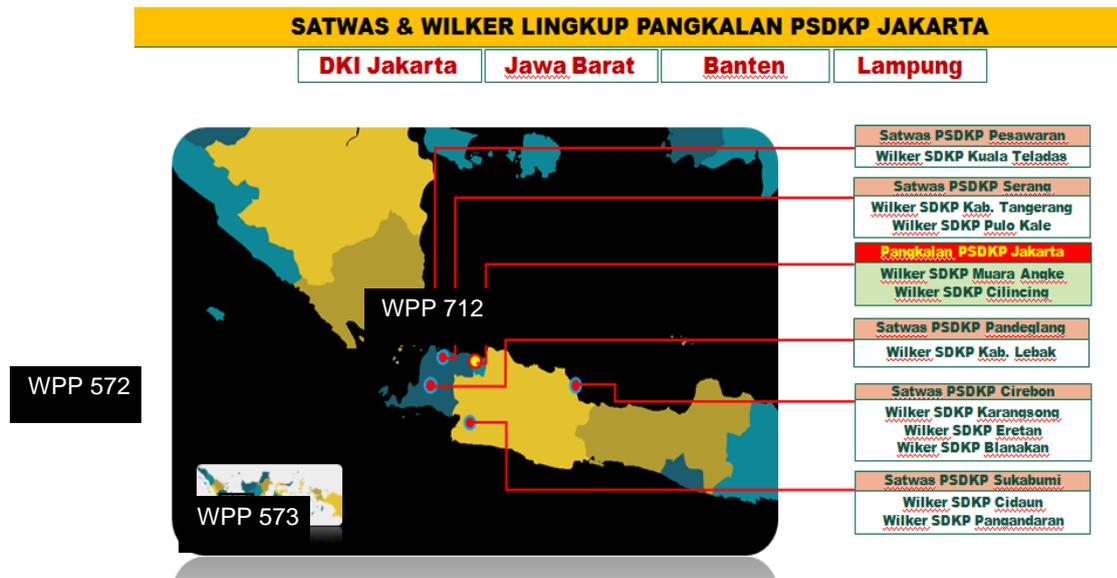
Wilayah kerja yang menjadi kewenangan Pangkalan PSDKP Jakarta, merupakan *fishing ground* yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati, selain melaksanakan pengawasan dibidang penangkapan ikan juga menerima kapal yang ditangkap oleh kapal pengawas perikanan yang di kawal ke Pangkalan PSDKP Jakarta dari perairan ZEEI Samudera Hindia dan Perairan Laut Utara Jawa tersebar di satwas lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta.

Sebagai gambaran yang menunjukkan wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta, ditampilkan peta sebaran satwas lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta mulai dari selatan Pulau Sumatera sampai Jakarta. Ditunjukkan pula mengenai sebaran Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang tersebar di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta

*Gambar 1. Struktur Organisasi Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta*

yaitu WPP 712 mencakup Perairan Utara Jawa, WPP 572 meliputi Perairan Samudera Hindia Barat Sumatera dan WPP 573 Perairan Samudera Hindia Selatan Jawa. Berikut peta sebaran wilayah kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta pada gambar

dibawah ini:



Gambar 1. Peta sebaran wilayah kerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta

Dalam melaksanakan operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta membawahi 5 Satuan Pengawasan. Satuan Pengawasan PSDKP tersebut dapat dilihat pada tabel 1 :

Tabel 1. Pembagian Satwas SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

No	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	Kab. Administratif Kep. Seribu, Kota Administratif Jakarta Utara, Kota Administratif Jakarta Pusat, Kota Administratif Jakarta Timur, Kota Administratif Jakarta Barat, Kota Administratif Jakarta Selatan, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kota Bandung Barat.
2	Satwas SDKP Pandeglang	Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang
3	Satwas SDKP Pesawaran	Kab. Lampung Barat, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Utara, Kab. Mesuji, Kab. Pesawaran, Kab. Pesisir Barat, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Way Kanan, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kab. Pesisir Barat
4	Satwas SDKP Cirebon	Kab. Subang, Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, Kota Cirebon

5	Satwas Sukabumi	SDKP	Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kota Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kota Pangandaran
6	Satwas Serang	SDKP	Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan

Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan melimpah dengan berbagai keragaman hayati dan non hayati. Selain melaksanakan pengawasan dibidang penangkapan ikan, Pangkalan PSDKP Jakarta juga melaksanakan pengawasan di bidang kelautan, budidaya, pengolahan dan distribusi hasil perikanan.

### **1.6 Armada Kapal Pengawas dan *Speedboat* Pengawas**

Dalam melaksanakan kegiatan operasi pengawasan SDKP Pangkalan PSDKP Jakarta didukung 2 (dua) unit armada kapal pengawas, 6 (enam) unit *speedboat* pengawas dan 2 (dua) unit tipe RIB & *Rubber Boat*. Rincian armada kapal pengawas, *speedboat*, RIB & *rubber boat* dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Data Armada Kapal Pengawas

No	Nama Kapal	Ukuran Kapal	Tipe Kapal
1	Hiu 10	28 meter	Kelas IV
2	Hiu 06	28 meter	Kelas IV

Tabel 3. Data Armada Kapal Pengawas Tipe RIB & Rubber Boat

No	Nama Kapal	Lokasi	Ukuran Kapal
1	<i>Sea Rider</i>	Pangkalan PSDKP Jakarta	8 meter
2	<i>Rubber Boat</i>	Satwas SDKP Pandeglang	5 meter

Tabel 4. Data Armada Kapal Pengawas tipe Speedboat

No	Nama Kapal	Lokasi	Ukuran Kapal
1	Napoleon 006	Pangkalan PSDKP Jakarta	12 meter
2	Dolphin 004	Satwas SDKP Serang	8 meter
3	Napoleon 014	Satwas SDKP Pesawaran	12 meter
4	Dolphin 022	Satwas SDKP Cirebon	8 meter
5	Napoleon 052	Satwas SDKP Sukabumi	12 meter
6	Hiu Biru 03	Pangkalan PSDKP Jakarta	11 meter

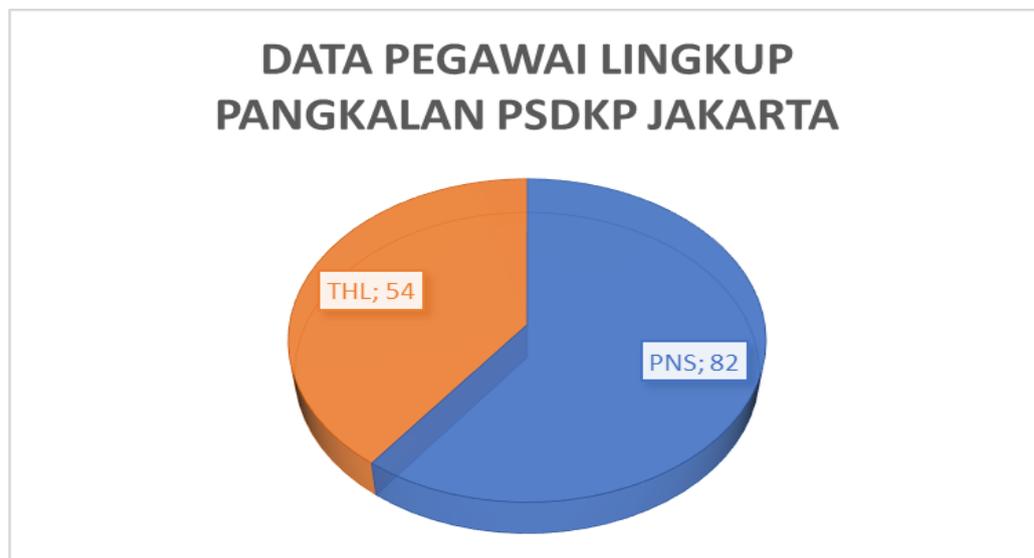
## 1.7 Kepegawaian

Sumber daya manusia Pangkalan PSDKP Jakarta selama tahun 2022 berjumlah 140 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 85 orang, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) berjumlah 55 orang. Data pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Data Pegawai Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

No	UNIT KERJA	Jumlah		TOTAL
		PNS Ditjen PSDKP	PPNPN	
1	Pangkalan PSDKP Jakarta	35	33	70
2	AKP Kapal Pengawas	18	-	18
3	Satwas SDKP Pesawaran	5	3	8
4	Satwas SDKP Pandeglang	3	2	5
5	Satwas SDKP Serang	4	3	7
6	Satwas SDKP Sukabumi	6	6	10
7	Satwas SDKP Cirebon	10	8	18
8	CPNS	4	-	4
<b>Jumlah</b>		<b>85</b>	<b>55</b>	<b>140</b>

Komposisi pegawai Pangkalan PSDKP Jakarta, Satuan Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta tersaji pada grafik dibawah ini:

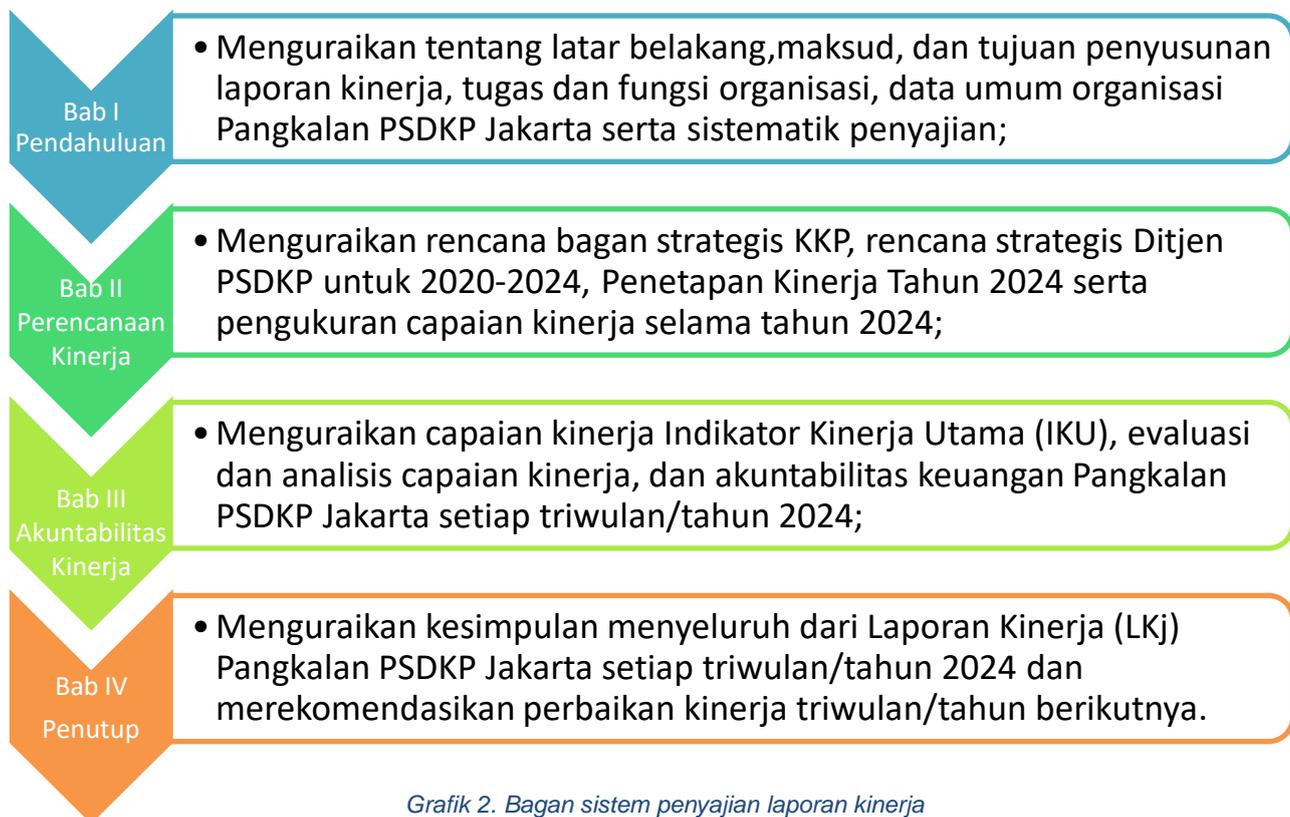


Grafik 1. Komposisi Jumlah Pegawai Lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta

Dari data pada diatas menggambarkan komposisi pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang sebagian besar berstatus PNS dan sebagian berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai daerah dalam melaksanakan fungsi dan menyelesaikan tugas Pengawasan SDKP, diperlukan kesepakatan/aturan antara Dirjen PSDKP dengan Dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas pegawai tersebut serta meningkatkan kompetensi, dapat menugaskan pegawainya untuk mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan.

### 1.8 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika Penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2024 diuraikan pada grafik berikut :



Grafik 2. Bagan sistem penyajian laporan kinerja

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**



Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: <sup>(1)</sup>Renstra Ditjen. PSDKP 2020-2024; <sup>(2)</sup> Renstra Pangkalan PSDKP Jakarta 2020-2024; dan <sup>(3)</sup> Penetapan Kinerja Tahun 2022.

## **2.1 Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024**

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2020-2024. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 melalui 2 (dua) pendekatan yaitu *logical model* yang utamanya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan format Bappenas. Pada pendekatan *logical model*, sasaran disusun secara logis dan terstruktur menjadi: sasaran strategis (K/L) yang menghasilkan dampak (*impact*), sasaran program (unit eselon I) yang menghasilkan (*Outcome*), dan sasaran kegiatan (unit eselon IV) yang menghasilkan keluaran (*output*). Dengan demikian, jika menggunakan pendekatan tersebut, maka sasaran Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024 merupakan sasaran program dari program pengawasan SDKP, yaitu:

- a. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP, dan
- b. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang professional dan partisipatif

## **2.2 Rencana Strategis Pangkalan PSDKP Jakarta**

Rencana sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2020-2024, merupakan penjabaran dari renstra Eselon I Ditjen

PSDKP, dengan tujuan yang akan dicapai, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta;
2. Tersedianya infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan sistem informasi dan komunikasi pengawasan SDKP;
3. Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta;
4. Terwujudnya ASN Pangkalan PSDKP Jakarta yang kompeten dan berkepribadian;
5. Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal dan mudah diakses di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta;
6. Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi Pangkalan PSDKP Jakarta yang berkepribadian;
7. Terkelolanya anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta secara efisien.

Untuk mencapai program kerja Pengawasan SDKP maka Pangkalan PSDKP Jakarta menetapkan tujuan yang akan dicapai, yaitu :

- a. Melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dari perusakan dan kegiatan *illegal*;
- b. Mewujudkan ketaatan para pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan;
- c. Terwujudnya industrialisasi perikanan.

Arah kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran lebih detail arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 khususnya pada kebijakan “membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan”. Sehingga kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, ditetapkan yaitu “Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna menegakkan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan”. Guna mewujudkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui 6 (enam) strategi *implementatif* yaitu :

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Regulasi

2. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan penguatan koordinasi dengan lintas institusi penegak hukum di laut
3. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (*Integrated Surveillance System/ISS*).
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan SDKP.
5. Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan SDKP di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.

### **2.3 Rencana Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun Anggaran 2023**

#### Program Pengawasan Pengelolaan PSDKP

##### A. Pemantauan dan Operasi Armada

1. Kinerja Operasi Kapal Pengawas
2. Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas
3. Pemenuhan Logistik Armada Pengawas SDKP
4. POKMASWAS yang Aktif Mendukung Pengawasan SDKP
5. Penyelesaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP
6. Penyelesaian Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan

##### B. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
2. Penyelesaian Penanganan Barbuk
3. Penyelesaian Penanganan Awak Kapal
4. Pengenaan Sanksi Administratif

##### C. Koordinasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

1. Jenis Ikan Yang Dilindungi Yang Diawasi Sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku
2. Pelaku Usaha Pengelolaan Jasa Kelautan Yang Patuh Terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Yang Patuh terhadap Peraturan perundang - undangan yang berlaku
4. Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut Nasional Yang Patuh terhadap

Peraturan perundang - undangan yang berlaku

5. Pelaku Usaha Perikanan Yang Bebas dari Destructive Fishing

D. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

1. Kapal Perikanan Yang Laik Operasional
2. Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
3. Unit Usaha Budidaya Ikan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang - undangan
4. Usaha Distribusi Hasil Perikanan Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang – undangan

E. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Taknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan)
3. Nilai WBK Pangkalan PSDKP Jakarta
4. Indeks Profesionalitas ASN
5. Nilai Rekonsiliasi Kinerja
6. Inovasi Gugus Kerja Transformasi
7. Kepatuhan Pengelolaan BMN
8. Kepatuhan Pengadaan/Barang Jasa
9. Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar
10. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
11. Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

## 2.4 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2020 - 2024, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Perjanjian kinerja telah ditetapkan pada bulan Januari 2024. Berikut perjanjian kinerja yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
<b>KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN</b>				
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	ISK1.1.1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	ISK1.2.1	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91
		ISK1.2.2	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91
		ISK.1.2.3	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100%
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK.1.3.1	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100%
		ISK.1.3.2	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100%
<b>KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN</b>				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	ISK2.1.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100
SK.2.2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	ISK.2.2.1	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100%
<b>KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN</b>				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	ISK3.1.1	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100
SK.3.2	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	ISK.3.2.1	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	100%
<b>KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	ISK4.1.1	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
		ISK4.1.2	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK.4.2	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	ISK.4.2.1	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93

## 2.5 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan Aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi khusus berbasis informasi teknologi.



### 3.1 Capaian Sasaran Strategis Pangkalan PSDKP Jakarta

Berdasarkan implementasi dalam pengelolaan kinerja, Ditjen. PSDKP telah menyempurnakan dan menetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai Rata-rata NPSS diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh SS yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Kepala Pangkalan Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta dengan Direktur Jenderal PSDKP.

### 3.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2024 ditabulasikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama Pangkalan PSDKP Jakarta Tahun 2024

Perspektif/sasaran startegis/Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	Capaian TW III 2024 (%)
SK1.1 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif					
IKU 1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81	-	-	-
SK.1.2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif					
IKU 2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91	91	91	100
IKU 3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91	91	93,04	102
IKU 4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100	100	100	100
SK.1.3 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan					
IKU 5	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100	-	-	-

IKU 6	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100	-	-	-
SK.2.1 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan					
IKU 7	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100	100	100	100
SK.2.2 Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan					
IKU 8	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)	100	-	-	-
SK.3.1 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan					
IKU 9	Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100	100	100	100
SK.3.2 Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan					
IKU 10	Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)	100	-	-	-
SK.4.1 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas					
IKU 11	Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80	70	80	114
IKU 12	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80	70	80	114
IKU 13	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Penerapan Sanksi Administratif (Indeks)	93	70	80	114
SK.5.1 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP					
IKU 14	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	80	80	93,2	117

IKU 15	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	75	-	-	-
IKU 16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100	100	100	100
IKU 17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	70	-	-	-
IKU 18	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	82	-	-	-
IKU 19	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	84	-	-	-
IKU 20	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80	-	-	-
IKU 21	Nilai implementasi program budaya kerja (nilai)	21	-	-	-
IKU 22	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Pangkalan PSDKP Jakarta (inovasi)	1	-	-	-
IKU 23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	94	94	125	120
IKU 24	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	80	-	-	-
IKU 25	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	80	-	-	-
IKU 26	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	93,76	-	-	-
IKU 27	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)	86	-	-	-

Kelompok Masyarakat Pengawas atau disingkat POKMASWAS adalah kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam mendukung kegiatan pengawasan SDKP. Pokmaswas merupakan mitra pengawas perikanan melalui laporan atau informasi adanya IUU Fishing di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta. IKU "Persentase POKMASWAS yang aktif yang mendukung pengawasan SDKP (%)" ini digunakan untuk mengukur tingkat keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan SDKP.

Pada periode triwulan III telah dilakukan pembinaan terhadap 6 (enam) lokasi, dengan jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina sebanyak 17 kelompok. Kegiatan tersebut belum dijadikan realisasi dikarenakan perhitungan dilakukan setiap semester. Perhitungan akan dilakukan pada akhir triwulan IV atau periode Januari-Desember sesuai dengan manual IKU Pangkalan PSDKP Jakarta.

Alokasi anggaran untuk IKU "Persentase POKMASWAS yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)" sebesar Rp. 1.300.000.000,-. Realisasi anggaran untuk kegiatan sebesar Rp. 423,756,747,- sehingga telah tercapai 32,60%.

## **Sasaran Kegiatan 2, Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif**

### **IKU 2 "Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)"**

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan (40%);
2. Cakupan wilayah pengawasan (40%);
3. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR (15%);
4. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama,

Terkoordinasi, Interdiksi (5%).

Berikut nilai dari setiap variabel pada kegiatan operasi kapal pengawas:

Tabel 8. Perhitungan Nilai Indeks Operasi Kapal Pengawas

No.	Kegiatan	KP. Hiu 06			KP. Hiu 10		
		Target	Realisasi	Nilai	Target	Realisasi	Nilai
1.	Pemeriksaan (40%)						
	a. Pemeriksaan Kapal Perikanan (70%)	90	73	57	90	109	70
	b. Pemeriksaan Kelautan (30%)	5	3	18	3	4	30
<b>Nilai Total</b>				<b>22</b>			<b>40</b>
2.	Coverage Area Pengawasan (40%)	0,14	0,20	40	0,14	0,24	40
	<b>Nilai Total</b>			<b>40</b>			<b>40</b>
3.	Tindak Lanjut Target Operasi (15%)						
	a. <i>Intercept</i> Indikasi Pelanggaran Kelautan dan Perikanan (60%)	0	6	60	0	5	60
	b. Dukungan Kegiatan SAR (40%)	0	0	40	0	0	40
<b>Nilai Total</b>				<b>15</b>			<b>15</b>
4.	Hasil Dukungan Operasi Lainnya (5%)						
	a. Jumlah Penyitaan Alkap Terlarang (30%)	0	0	30	0	1	30
	b. Jumlah Pemutusan Rumpon Ilegal (30%)	0	0	30	0	0	30
	c. Dukungan Ops Bersama (40%)	0	0	40	0	1	40
<b>Nilai Total</b>				<b>5</b>			<b>5</b>
<b>Total Nilai Indeks</b>				<b>82</b>			<b>100</b>
<b>TOTAL</b>				<b>91</b>			

Kinerja kapal pengawas Pangkalan PSDKP Jakarta terdiri dari kapal pengawas Hiu 06 dan Hiu 10. Sebagian besar variabel telah memenuhi target yang ditentukan, hanya terdapat 1 (satu) komponen pada variabel pemeriksaan yang belum memenuhi target yaitu kegiatan pemeriksaan kelautan belum tercapai. Target pemeriksaan kelautan (30%) dengan target 5 kegiatan pemeriksaan kelautan belum tercapai dengan realisasi 3 kegiatan. Pemeriksaan kelautan belum tercapai karena kegiatan perlu adanya koordinasi dengan tim kerja terkait dan perlu menyesuaikan rencana kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan. Nilai total keseluruhan dari kegiatan kinerja operasi kapal pengawas sebesar 91, nilai tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan sehingga capaian untuk IKU ini adalah

100%. Berikut nilai indeks kinerja operasi kapal pengawas periode triwulan III tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 9. Rekapitulasi Capaian IKU Indeks Kinerja Kapal Pengawas

SUB IKU	TAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Indeks Kinerja Kapal Pengawas (Indeks)	91	91	100

Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai target, hal tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas telah sesuai dengan rencana operasi yang telah direncanakan. Kesesuaian tersebut tidak lepas dari peran serta tim perencanaan yang selalu berkoordinasi dengan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada untuk mengetahui perhitungan yang sesuai dengan manual iku. Jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2023, realisasi tahun 2024 menurun dari tahun sebelumnya. Menurunnya IKU ini dari 97,5 menjadi 91 dikarenakan pada tahun 2023 belum ada kegiatan pemeriksaan kelautan. Terdapat perbedaan perhitungan pada IKU ini sehingga IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun ini secara capaian.

Alokasi anggaran tahun 2024 untuk mendukung IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas sebesar Rp 7.485.787.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.909.904.412,- (52,53%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 52,53% dapat disimpulkan penggunaan anggaran cukup efisien.

### **IKU 3 “Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas”**

Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif.

Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni :

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
- 2) Cakupan wilayah pengawasan;

- 3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- 4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Tabel 10. Rekapitulasi Capaian IKU Indeks Kinerja Speedboat

SUB IKU	TAHUN 2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Indeks Kinerja <i>Speedboat</i> (Indeks)	91	93,04	102

Indeks kinerja operasi *speedboat* pengawas Pangkalan PSDKP Jakarta pada triwulan III tahun 2024 adalah 93,04 dengan target yang telah ditentukan sebesar 91, sehingga nilai capaian IKU ini sebesar 102%. Berikut perhitungan nilai indeks kinerja operasi kapal pengawas tahun 2024, pada tabel dibawah ini :

Tabel 11. Nilai indeks kinerja operasi *speedboat* triwulan III tahun 2024

Speedboat Pengawas	Pemeriksaan kapal dan Kelautan (40%)						Coverage Area Pengawasan (40%)			Intercept indikasi Pelanggaran kelautan Perikanan (60%)			Dukungan kegiatan SAR (40%)			Jumlah target tidak operasi (15%)			Jumlah Penyitaan Alkap Terlarang (40%)			Dukungan Ops Bersama (20%)			Jumlah Pemutusan Rumpon Illegal (40%)			Hasil dukungan Operasi Lainnya (5%)	Total Nilai Indeks	Capaian Indeks
	Pemeriksaan kapal (50%)			Pemeriksaan Kelautan (50%)			T	R	Nilai Total	T	R	Nilai	T	R	Nilai	T	R	Nilai	T	R	Nilai	T	R	Nilai	Nilai Total					
	T	R	Nilai	T	R	Nilai																				T	R	Nilai		
Hiu Biru	37	73	50,00	6	11	50,00	40,00	0,0533	0,0533	40,00	0	0	60,00	0	0	40,00	15,00	0	14	40,00	0	3	20,00	0	0	40,00	5,00	100	93,04	
Sea Rider/RIB	24	27	50,00	6	2	16,67	26,67	0,0183	0,0166	36,28	0	0	60,00	0	0	40,00	15,00	0	4	40,00	0	9	20,00	0	0	40,00	5,00	83		
Napoleon 06	24	58	50,00	6	0	0,00	20,00	0,0183	0,0160	34,97	0	0	60,00	0	0	40,00	15,00	0	0	40,00	0	0	20,00	0	0	40,00	5,00	75		
Napoleon 14	24	55	50,00	6	4	33,33	33,33	0,0183	0,0330	40,00	0	0	60,00	0	0	40,00	15,00	0	0	40,00	0	0	20,00	0	0	40,00	5,00	93		
Napoleon 52	24	75	50,00	6	35	50,00	40,00	0,0183	0,0311	40,00	0	0	60,00	0	0	40,00	15,00	0	0	40,00	0	0	20,00	0	0	40,00	5,00	100		
Dolphin 04	24	51	50,00	6	7	58,33	40,00	0,0183	0,0214	40,00	0	0	60,00	0	0	40,00	15,00	0	0	40,00	0	0	20,00	0	0	40,00	5,00	100		
Rubber Boat	24	33	50,00	6	6	50,00	40,00	0,0183	0,0257	40,00	0	0	60,00	0	0	40,00	15,00	0	0	40,00	0	0	20,00	0	0	40,00	5,00	100		

Berdasarkan tabel diatas, realisasi nilai indeks kinerja operasi *speedboat* Pangkalan periode triwulan III tahun 2024 Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 93,04. Nilai tersebut diperoleh dari beberapa indikator kuantitatif dan kualitatif yang telah dicapai sampai dengan September 2024. Jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2023, realisasi tahun ini menurun dari tahun sebelumnya. Menurunnya capaian pada IKU ini dari 90,12 menjadi 88,57 dikarenakan pada tahun 2024 kegiatan operasi *speedboat* berjalan sesuai dengan rencana akan tetapi terdapat kerusakan mesin pada beberapa *speedboat* pada tahun 2024 dan mempengaruhi kegiatan pemeriksaan kelautan pada triwulan III.

Alokasi anggaran pada triwulan III tahun 2024 untuk mendukung IKU Indeks Kinerja

*Speedboat* Pengawas sebesar Rp 1,134,361,000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 284,018,456,- (25,04%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 97,33% dan realisasi anggaran sebesar 25,04% dapat disimpulkan penggunaan anggaran cukup efisien.

#### **IKU 4 “Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)”**

Indeks pemenuhan logistik armada pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan logistik kapal dan pemenuhan logistik personel. Logistik kapal terdiri dari Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas. Logistik Personel terdiri dari bahan makanan, air tawar, dan alat-alat pelayanan (ATK, bahan komputer, komaliwan, peta dan atau buku jurnal deck & mesin).

Kegiatan pemenuhan logistik armada kapal pengawas telah terlaksana dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan BBM dari Januari-September yang berasal dari berita acara BBM akhir bulan;
2. Pemenuhan kebutuhan pelumas dari Januari-September yang berasal dari Surat Permintaan Kebutuhan BBM dari Kapal Ke Kantor dan SPJ Pembelian/BAST;
3. Pemenuhan kebutuhan bahan makan dari bulan Januari- September yang berasal Surat Pengantar Kebutuhan Bahan Makanan/Natura dari Kapal Ke Kantor beserta SPJ Pembelian;
4. Pemenuhan kebutuhan air tawar setiap bulan dari Januari- September yang berasal dari Surat Pengantar Kebutuhan Air Tawar dari Kapal Ke Kantor beserta SPJ Pembelian;
5. Pemenuhan kebutuhan alat pelayanan setiap bulan dari Januari-September yang berasal dari Surat Pengantar Kebutuhan ATK, CS, Jurnal Deck/Mesin, Peta Laut, Buku Pasang Surut dan alat alat layanan lainnya.

Berikut rekapitulasi persentase pemenuhan logistik kapal pengawas berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini :

Tabel 12. Capaian Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas

SUB IKU	TAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100	100	100

Indikator logistik diatas telah terpenuhi selama periode triwulan III sehingga realisasi yang dicapai Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 100% yaitu sesuai dengan target yang telah ditentukan sebesar 100%. Capaian IKU “Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas” diperoleh sebesar 100%. Kesesuaian realisasi dengan target yang telah ditentukan merupakan suatu keberhasilan yang dicapai. Keberhasilan kegiatan ini dikarenakan adanya pegawai yang kompeten dalam pelaksanaan kebutuhan logistik armada pengawasan SDKP dan adanya komunikasi yang baik antara awak kapal pengawas dengan Subkoordinator Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKP Jakarta.

IKU “Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)” merupakan IKU baru sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran pada triwulan III tahun 2024 untuk mendukung IKU Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan SDKP sebesar Rp 4,851,717,000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1,859,743,000,- (38,33%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 38,33% dapat disimpulkan penggunaan anggaran cukup efisien.

### 3.2.1 Sasaran Kegiatan 3, Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

Dalam rangka pencapaian SK “Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan”, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan IKU, sebagai berikut :

#### IKU 5 “Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)”

Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%) adalah persentase progres pelaksanaan pengadaan pembangunan/ renovasi/ rehabilitas/ restorasi. Pangkalan PSDKP Jakarta akan melaksanakan pembangunan kalamo di Satwas

SDKP Sukabumi dan pengurangan lahan dibelakang mess kantor Pangkalan PSDKP Jakarta. Pada periode triwulan III tahun 2024, kegiatan persentase sarana dan prasarana belum selesai dilaksanakan, dan perhitungan akan dilaksanakan pada akhir tahun.

#### **IKU 6 “Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”**

Kegiatan “Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” merupakan jumlah persentase kegiatan Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana pengawasan SDKP meliputi : 2 (dua) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 7 (tujuh) unit (Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat). Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari :

- a. perawatan pencegahan (preventive maintenance 50%);
- b. perawatan prediktif (predictive maintenance 40 %);
- c. perawatan darurat (breakdown maintenance 10%).

Pada periode triwulan III tahun 2024, kegiatan persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP sudah terlaksana melalui perawatan rutin per bulan, dan perhitungan akan dilaksanakan pada akhir tahun.

#### **3.2.2 Sasaran Kegiatan 4, Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan” yaitu upaya pengawasan usaha kelautan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan. Berikut kegiatan yang mendukung sasaran kegiatan tersebut:

#### **IKU 7 " Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)"**

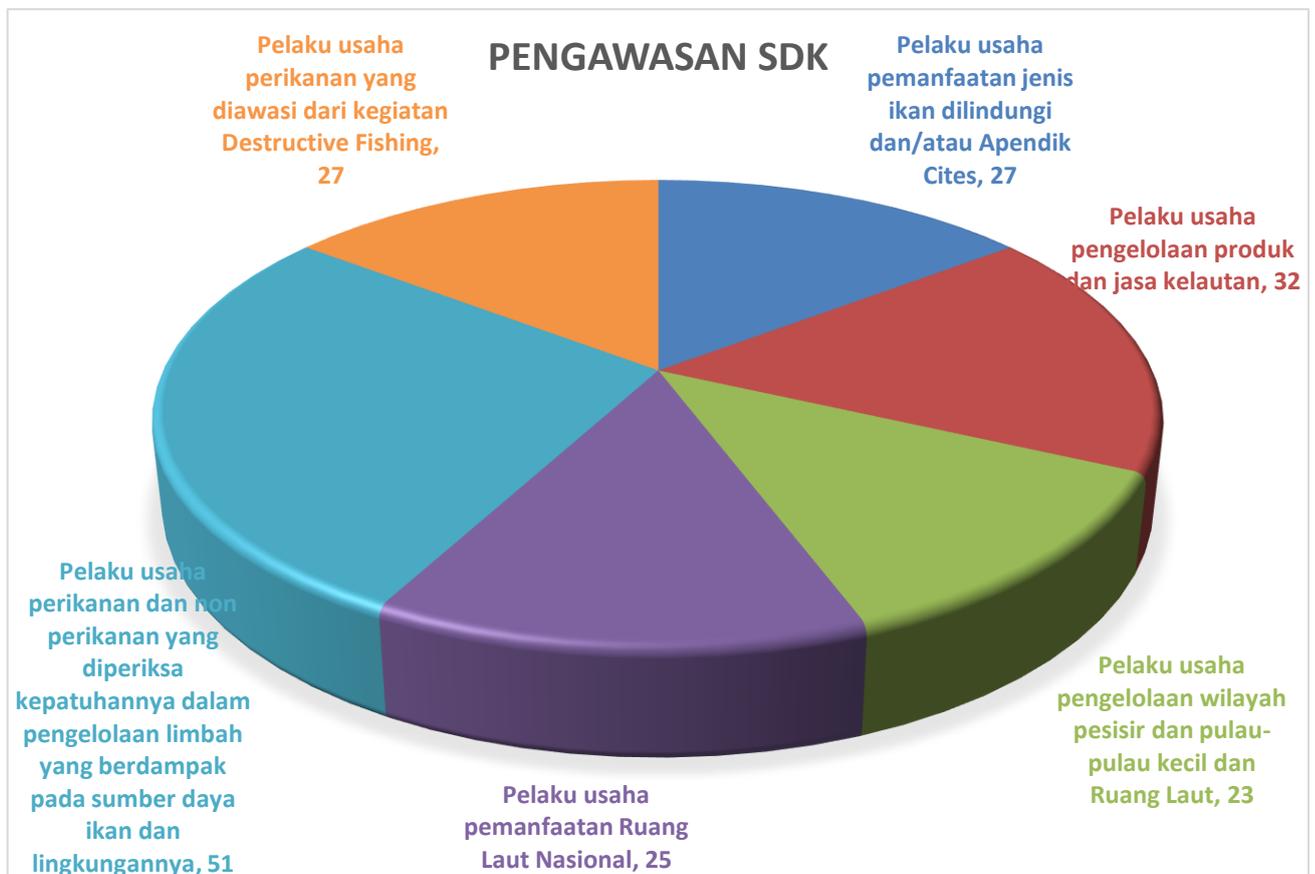
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai) pada triwulan III tahun 2024 telah terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100%. Hasil pengukuran 5 Sub-IKU yang berkontribusi pada pencapaian IKU “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Pangkalan PSDKP

Jakarta (%)”, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 13. IKU Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)

SUB IKU	TRIWULAN I TAHUN 2024		
	TARGET	REALISASI	(%)
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100	100	100

Dari data diatas, realisasi IKU pada triwulan III tahun 2024 mencapai 100 dengan target sebesar 100 sehingga memperoleh capaian sebesar 100%. Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan kegiatan pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan sebanyak 185 pelaku usaha yang berada di lingkup wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta. Hasil pengukuran pada setiap Sub-IKU pada tabel diatas sudah memenuhi tahapan pemeriksaan oleh Pengawas Perikanan yaitu Surat Perintah Tugas (SPT), Berita Acara Pemeriksaan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan. Berikut grafik kinerja pengawasan kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan:



Grafik 2. Rekapitulasi kegiatan kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan

Pada grafik diatas terlihat nilai tertinggi yang dilakukan pada pengawasan kepatuhan pelaku usaha kelautan adalah kegiatan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa dengan total jumlah 36 pelaku usaha. Nilai terendah adalah kegiatan pengawasan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa dengan jumlah 19 pelaku usaha. Total jumlah pelaku usaha sampai dengan September 2024 adalah 134 pelaku usaha.

Perbandingan dengan triwulan III tahun 2023, capaian untuk kegiatan penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan adalah 100% dengan jumlah pelaku usaha yang telah diawasi sebanyak 114 pelaku usaha. Pangkalan PSDKP Jakarta berhasil mempertahankan kinerjanya selama periode ini dengan meningkatkan jumlah pelaku pengawasan dari 114 menjadi 134 pelaku usaha. Meningkatnya pengawasan pelaku usaha kelautan dikarenakan telah dilakukan perencanaan dengan baik oleh tim kerja SDK yaitu mengelompokkan pengawasan berdasarkan lokasi.

Alokasi anggaran untuk IKU "Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)" sebesar Rp 2,111,415,000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 349,799,544,- (16,57%). Realisasi anggaran masih rendah dikarenakan terdapat kegiatan yang anggarannya masih dalam proses pencairan.

### **3.2.3 Sasaran Kegiatan 5, Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan**

Dalam rangka pencapaian SK "Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan", Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan IKU, sebagai berikut :

#### **IKU 8 "Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Kelautan (%)"**

Penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh.

Pengawas perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta belum melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan dikarenakan perhitungan dilaksanakan pada akhir tahun. Kegiatan memerlukan persiapan terkait kasus yang sedang marak di wilayah kerja lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta, sehingga perlu adanya peninjauan lokasi terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan.

### 3.3.6 Sasaran Kegiatan 6, Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan

Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan.

#### IKU 9 "Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (Nilai)"

Penentuan nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan mengacu pada tabel berikut ini:

Tabel 14. Perhitungan IKU "Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan"

No.	Kegiatan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan.	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

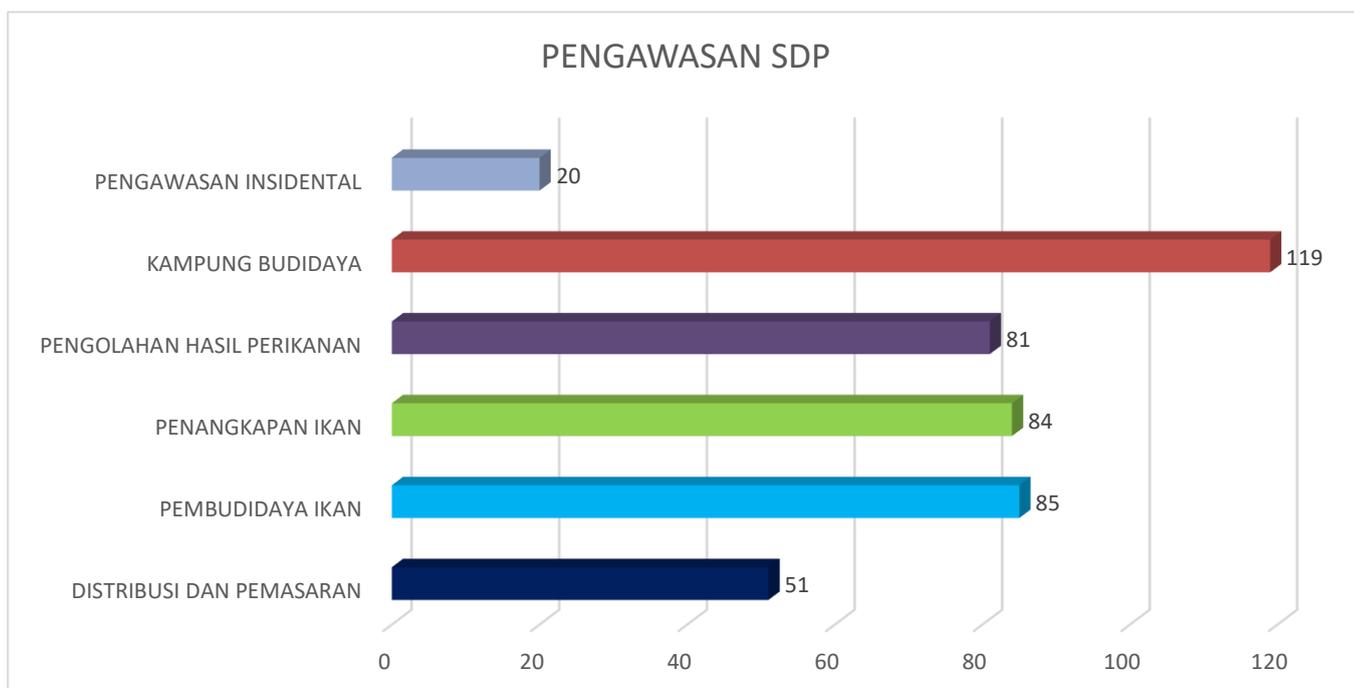
. Perhitungan realisasi berdasarkan tahapan pemeriksaan yaitu persiapan, pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha dan penyusunan laporan hasil pengawasan yang ditembuskan kepada Direktur PPSDP. Pengawasan yang telah diperiksa dan sesuai dengan tahapan pemeriksaan akan memperoleh nilai 100. Target IKU ini sebesar 100, maka capaian yang didapatkan adalah 100%. Pangkalan PSDKP Jakarta telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan didukung adanya personal pengawas perikanan yang kompeten dan mendokumentasikan kegiatan pengawas langsung dihari yang sama pada grup *Whatsapp* Pangkalan PSKDP Jakarta.

Pada triwulan III tahun 2024, IKU ini sudah terealisasi sebanyak 440 ID proyek dari 5 kegiatan pengawasan. Seluruh kode proyek yang diperiksa telah memenuhi tahapan pemeriksaan sehingga capaian pada tahun ini 100% dengan target sebesar 100% sehingga realisasi sesuai dengan target. Lokasi pengawasan dilaksanakan di sekitar wilayah Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Tabel 15. Rekapitulasi IKU “Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan” triwulan III tahun 2024

SUB IKU	TAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)
Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (Nilai)	100	100	100

Pada triwulan III tahun 2024, pengawasan yang telah sesuai dengan tahapan pemeriksaan sebanyak 440 ID proyek. Pengawasan tersebut terdiri dari 5 (lima) kegiatan berdasarkan kode proyek yaitu pelaku usaha pembudidaya ikan, penangkapan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan serta kampung budidaya. Berikut rekapitulasi jumlah kegiatan pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaatan sumber daya perikanan di Pangkalan PSDKP Jakarta :



Grafik 3. Rekapitulasi Kegiatan yang Mendukung Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan/atau Pemanfaat Sumber Daya Perikanan

Pada periode triwulan III tahun 2023 kegiatan ini telah terealisasi sebesar 100% dengan jumlah pengawasan terhadap 291 KBLI/kode proyek sedangkan pada periode tahun ini telah tercapai 440 kode proyek dengan capaian 100%. Berdasarkan kuantitas nilai triwulan III tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya dan secara capaian Pangkalan PSDKP Jakarta dapat mempertahankan kinerjanya sebesar 100%.

Alokasi anggaran triwulan III tahun 2024 untuk mendukung IKU persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar Rp 2,211,790,000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 562,526,319,- (25,43%). Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 7,7% dapat disimpulkan penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisien karena kegiatan pengawasan sudah dilaksanakan sesuai rencana dan adanya penggabungan kegiatan pengawasan UPI dengan pengawasan distribusi pada periode ini.

### **3.3.7 Sasaran Kegiatan 6, Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan**

Dalam rangka pencapaian SK “Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan”, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan IKU, sebagai berikut :

#### **IKU 10 "Persentase Penyelesaian Pengumpulan Data dan Informasi Intelijen Perikanan (%)”**

Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha adalah perbandingan nilai tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha dengan jumlah pelaku usaha perikanan yang diriksa. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan adalah upaya untuk memastikan tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan melalui tahapan pemeriksaan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pelaku usaha perikanan adalah unit/proyek usaha orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang perikanan mencakup subsektor penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan. Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan terdiri atas pengawasan rutin berbasis OSS dan pengawasan lainnya (pengawasan penangkapan ikan terukur, importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya ikan prioritas nasional, dan/atau tindak lanjut aduan masyarakat) yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental.

Pengawas perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta belum melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan dikarenakan perhitungan dilaksanakan

pada akhir tahun.

### **3.3.7 Sasaran Kegiatan 8, Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas**

Dalam rangka pencapaian SK “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas”, Pangkalan PSDKP Jakarta telah mengidentifikasi IKU, sebagai berikut :

#### **IKU 11 “Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)”**

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada :

- UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Perhitungan jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan untuk pencapaian indikator kinerja UPT PSDKP merupakan rata-rata capaian komponen SPKP dan komponen selain SPKP yaitu PIT, SEDIMENTASI, PKKPR, dll. Sanksi administratif diberikan kepada pelaku usaha perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan dokumen perizinan melalui sistem pemantauan kapal perikanan. Sampai dengan September 2024, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran SPKP sebanyak 609 kasus pelanggaran dan seluruhnya telah ditindak lanjuti dengan kasus bukan pelanggaran sebanyak 354 kasus, SP 1 sebanyak 249 kasus dan SP 2 sebanyak 6 kasus sehingga nilai rata-rata untuk komponen SPKP sebesar 100%. Kriteria indeks persentase 100% termasuk kedalam nilai indeks 80 dengan kriteria “baik”, sehingga Capaian IKU ini pada triwulan III sebesar 114%.

Tabel 16. Indeks sanksi administratif triwulan III tahun 2024

SUB IKU	TRIWULAN III TAHUN 2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)
Indeks sanksi administratif	70	80	114

Pada triwulan III tahun 2023, IKU ini terealisasi sebanyak 179 kasus dengan nilai capaian sebesar 100%, sedangkan pada tahun ini terealisasi sebanyak 609 kasus dengan capaian 114%. Meningkatnya kasus pelanggaran melalui sistem pemantauan kapal perikanan dikarenakan adanya pengendalian pengawasan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 telah dibentuk tim kerja penanganan pelanggaran di setiap UPT, termasuk Pangkalan PSDKP Jakarta. Tim kerja ini meningkatkan produktivitas kegiatan di bidang penanganan pelanggaran.

Alokasi anggaran pada tahun 2023 untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp 626,000,000,-, dan telah terealisasi sebesar Rp. 86,191,039 (13,77%). Realisasi anggaran masih rendah dikarenakan terdapat kegiatan yang anggarannya cukup besar belum terlaksana yaitu sosialisasi yang melibatkan pelaku usaha. Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III. Berdasarkan analisis capaian kinerja IKU yakni 100% dan realisasi anggaran sebesar 13,77% dapat disimpulkan penggunaan anggaran cukup efisien.

### **IKU 12 “Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)”**

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Perhitungan kegiatan ini. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b).Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Pada periode triwulan III tahun 2024, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan rekapitulasi kapal perikanan yang terindikasi pelanggaran berdasarkan surat dari Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada. Total kapal perikanan yang melanggar di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar 609 kapal yang kemudian dilakukan pemanggilan untuk diminta klarifikasi dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sampai dengan September 2024, pengawas perikanan telah melakukan klarifikasi sebanyak 609 orang/pelaku usaha. Realisasi untuk IKU ini sebesar 100% dan berdasarkan kriteria indeks, persentase 100% termasuk kedalam nilai indeks maksimal 80 dengan kriteria “baik” sehingga capaian pada IKU ini sebesar 114% karna nilai indeks sesuai dengan target yang telah ditentukan.

*Tabel 17. Rekapitulasi Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan triwulan III tahun 2024*

SUB IKU	TRIWULAN III TAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	70	80	114

### **3.3.8 Sasaran Kegiatan 9, Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas**

Dalam rangka pencapaian SK “Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas”, Pangkalan PSDKP Jakarta telah mengidentifikasi IKU, sebagai berikut :

#### **IKU 13 “Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)”**

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dan tidak ada capaian kasus di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan. Apabila terdapat kasus yang di biayai oleh unit satker pusat, maka perhitungan capaian kinerja di claim sebagai capaian unit kerja yang mebiayai dengan catatan di dalam SPRINDIK terdapat PPNS Pusat dalam pelaksanaan penyidikan.

Sampai dengan September 2024, terdapat 1 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang telah ditindaklanjuti yaitu kasus pengeluaran Benih Bening Lobster (BBL) secara ilegal atau melakukan kegiatan usaha perikanan yang tidak memiliki perizinan berusaha. Kegiatan tersebut ditemukan berdasarkan laporan pengaduan masyarakat pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024. Pengawas Perikanan PSDKP Jakarta dengan TNI Angkatan Laut melakukan pemeriksaan terhadap rumah/gudang yang telah ditargetkan. Pada gudang tersebut ditemukan barang bukti Benih Bening Lobster (BBL) sebanyak 49.701 ekor BBL, barang-barang yang mendukung untuk kegiatan penyegaran dan pengemasan BBL, serta terdapat 6 pegawai di dalam Gudang tersebut. Kasus tersebut telah ditindaklanjuti dengan melakukan beberapa tahap yaitu :

1. Penanganan di tempat perkara

Berdasarkan Laporan Terjadinya Tindak Pidana Perikanan (LT2P2), Nomor : B.3168/PSDKPLan.3/PW.410/IX/2024 tanggal 05 September 2024.

2. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap 21 saksi.

3. Pemeriksaan

Permintaan pemeriksaan terhadap saksi, saksi pelapor, ahli perikanan, ahli forensik, operator siloker, dan tersangka.

4. Penangkapan

Pada perkara ini tidak dilakukan penangkapan TERSANGKA, terhadap tersangka dan saksi-saksi fakta lainnya pada tanggal 05 September 2024 diamankan oleh Pengawas Perikanan ke Kantor Pangkalan PSDKP Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

5. Penahanan

penahanan terhadap tersangka a.n. RAYNER RYADI berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta nomor Han.001/PSDKPLan.3/PW.410/IX/2024 tanggal 07 September 2024.

6. Penggeledahan

Dilakukan penggeledahan terhadap beberapa orang yang dianggap perlu.

7. Penyitaan

Penyitaan dilakukan kepada barang pribadi milik beberapa orang yang dianggap perlu.

8. Penyisihan Barang Bukti

Berita Acara Barang Bukti yang Disisihkan dari Pemusnahan Digunakan untuk Pembuktian di Persidangan, tanggal 05 September 2024.

Kasus terkait BBL pada 5 September 2024 telah diselesaikan sampai dengan tahap II, sehingga realisasi iku ini sebesar 100%. Berdasarkan kriteria indeks, persentase 100% termasuk kedalam nilai indeks maksimal 80 dengan kriteria “baik” sehingga capaian pada IKU ini sebesar 114% karena nilai indeks sesuai dengan target yang telah ditentukan. Berikut perhitungan IKU Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks) pada triwulan III tahun 2024.

*Tabel 18. Rekapitulasi Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan triwulan I tahun 2024*

SUB IKU	TRIWULAN III TAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)
Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	70	80	114

### 3.3.8 Sasaran Kegiatan 10, Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP. Dalam rangka pencapaian SK “Tata Kelola Pemerintah yang Baik lingkup Ditjen PSDKP”, berikut beberapa IKU yang menunjang SK 10 :

#### IKU 14 “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)”

Indeks kepuasan masyarakat didapatkan dari nilai SKM yang dilaksanakan setiap triwulan sekali melalui aplikasi Susan KKP. Nilai SKM pada triwulan III tahun 2024 merupakan nilai IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)” yaitu sebesar 93,2 dengan capaian sebesar 115%. Capaian triwulan III adalah hasil rata-rata dari triwulan I,II, dan III. Nilai tersebut didapatkan dari aplikasi SUSAN KKP. Berikut adalah rincian nilai “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)” Pangkalan PSDKP Jakarta :

Tabel 19. IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta triwulan III

IKU	TRIWULAN III TAHUN 2023		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Indeks)	80	93,2	117

Kegiatan ini merupakan IKU baru sehingga tidak bisa di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada triwulan III tahun 2023, nilai IKM di dapatkan pada survey kepuasan masyarakat secara manual atau menggunakan form/kertas yang diisi oleh pengguna layanan, akan tetapi tahun ini pengisian sudah menggunakan *mobile* melalu aplikasi Susan KKP.

**IKU 15 “Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup UPT Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)**

Pangkalan PSDKP Jakarta telah melaksanakan kegiatan yang mendukung Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sejak pencahangan pertama pada Oktober 2017. Pangkalan PSDKP Jakarta telah berkomitmen untuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komponen penilaian dalam Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan kualitas pelayanan publik.

**IKU 16 “Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”**

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i)

rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Pada triwulan III tahun 2024, Pangkalan PSDKP Jakarta telah melakukan pengendalian manajemen risiko yang dituangkan dalam form pengendalian dan pemantauan risiko. Rencana pengendalian risiko sebanyak 24 dokumen. Dokumen tersebut telah terpenuhi sebanyak 24 dokumen setiap triwulan dan disampaikan kepada tim SPIP, sehingga didapatkan capaian IKU ini sebesar 100%.

*Tabel 18. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) triwulan III tahun 2024*

IKU	Triwulan III Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian(%)
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	100	100	100

Pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta telah dilakukan secara rutin setiap triwulan dari tahun 2023, sehingga capaian dari tahun sebelumnya sama dengan tahun ini. Kegiatan ini juga rutin dipantau oleh Seditjen PSDKP melalui luring maupun daring lingkup Ditjen PSDKP.

### **IKU 17 “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)”**

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip,

kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pangkalan PSKDP Jakarta akan melaksanakan kegiatan “Nilai Pengawasan Kearsipan Interla lingkup Ditjen. PSDKP” pada triwulan IV atau akhir tahun. Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

### **IKU 18 “Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)”**

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

Pengukuran kegiatan ini dilakukan setiap semester. Berdasarkan IK yang digunakan Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu : (1) Kualifikasi; (2) Kompetensi; (3) kinerja; dan (4)

Disiplin. Pengukuran kinerja ini dilakukan pada akhir tahun 2023. beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian IK ini antara lain:

- a. Melakukan update data SDMA yang terdapat dalam aplikasi Simpeg meliputi data pendidikan, pelatihan dll.
- b. Monitoring dan evaluasi secara berkala tingkat kehadiran pegawai PSDKP melalui *finger print online*.
- c. Monitoring dan Evaluasi pengisian capaian kinerja Output individu pada Aplikasi E-SKP
- d. Pembinaan pegawai pada Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta.

Pada Semester II, Pangkalan PSDKP Jakarta telah mendapatkan nilai ASN sebesar 81,27 dengan ketegori “Tinggi”. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Pangkalan PSDKP Jakarta

telah berhasil mencapai target yaitu 77 sehingga capaian yang diperoleh sebesar 120%. Nilai tersebut diperoleh pada ropeg.kkp.go.id dan telah disahkan pada Memorandum Sekretaris Ditjen. PSDKP dengan Nomor : 1282/PSDKP.1/KP.720/VII/2024. Dengan rincian perhitungan IKU sebagai berikut :

IKU	Triwulan I Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian(%)
Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Jakarta (indeks)	77	81,27	120

### **IKU 19 “Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)”**

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai) akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2024 atau pada bulan Juli 2023.

### **IKU 20 “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)”**

Capaian kinerja IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)” diperoleh dari jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Pangkalan PSDKP Jakarta berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2023 s.d 31 Maret 2024 yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Selama periode LHP tersebut, Pangkalan PSDKP Jakarta memperoleh 10 (sepuluh) jumlah rekomendasi dari Inspektorat Jenderal. Seluruh rekomendasi tersebut telah diselesaikan dan ditindaklanjuti sehingga realisasi IKU ini sebesar 100% sesuai dengan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor : B.2762/PSDKP.1/TU.140/VII/2024. Berikut perhitungan capaian IKU ” Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)” :

IKU	Triwulan III Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian(%)
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80	100	120

### **IKU 21 “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)”**

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Pangkalan, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.

Pada periode triwulan I, Pangkalan PSKDP Jakarta telah melaksanakan kegiatan implementasi budaya kerja secara berkala. Penilaian IKU “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)” akan dilaksanakan pada triwulan III atau triwulan IV sehingga realisasi pada triwulan I adalah pemenuhan data dukung kegiatan budaya kerja.

### **IKU 22 “Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta (Inovasi)”**

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan.

Pada periode triwulan I, Pangkalan PSKDP Jakarta telah melaksanakan kegiatan implementasi budaya kerja secara berkala. Penilaian IKU “Inovasi yang Dihasilkan (Inovasi)” akan dilaksanakan pada triwulan III atau triwulan IV sehingga realisasi pada triwulan I adalah pemenuhan data dukung kegiatan budaya kerja.

### **IKU 23 “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”**

Pangkalan PSDKP Jakarta menggunakan sistem manajemen yang sama yang digunakan di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu aplikasi Bitriks. Perhitungan capaian ini didasarkan atas 3 komponen yaitu: <sup>(1)</sup>Dokumen; <sup>(2)</sup>Keikutsertaan <sup>(3)</sup>Keaktifan. Realisasi IKU “Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” triwulan III tahun 2024 sebesar 125%. Target yang ditentukan pada tahun ini adalah 94%, sehingga di dapatkan capaian IKU ini sebesar 120%. Berikut nilai unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar periode triwulan III tahun 2024:

*Tabel 19. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%) triwulan III tahun 2024*

IKU	Triwulan III Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)	94	125	120

### **IKU 24 “Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”**

Kegiatan “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada bulan Desember 2024.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Pangkalan PSDKP Jakarta tahun 2023 berdasarkan jumlah nilai dari 5 unsur. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022;
- 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- 3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019;

- 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- 5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Pada periode triwulan III, Pangkalan PSKDP Jakarta akan melaksanakan IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” pada triwulan IV atau akhir tahun.

### **IKU 25 “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)”**

Kegiatan “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (%)” merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada bulan Desember 2024. Tingkat kepatuhan PBJ lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta diukur berdasarkan jumlah nilai dari 6 (enam) komponen. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- 3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
- 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

### **IKU 26 “Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (nilai)”**

Capaian kinerja IKU “Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta” diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Pengukuran IK Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran meliputi 8 (delapan) indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain :

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA  $\geq 95$ ;
- b. Baik, apabila  $89 \leq$  nilai IKPA  $< 95$ ;
- c. Cukup, apabila  $70 \leq$  nilai IKPA  $< 89$ ; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA  $> 70$

Pada periode triwulan III, tidak ada realisasi dikarenakan IKU dihitung setiap semester. IKU ini akan dihitung kembali di semester II tahun 2024 atau pada Laporan Kinerja Tahunan. Target yang akan capai sama dengan triwulan II yaitu 93,76.

### **IKU 27 "Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta (Nilai)"**

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan oleh Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Jakarta kedalam aplikasi SMART DJA ([monev.anggaran.kemenkeu.go.id](http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id)). Pengukuran kinerja IKU ini dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga belum ada realisasi pada triwulan III tahun 2024.

### 3.4 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang dikelola Pangkalan PSDKP Jakarta sebesar Rp. 42.222.301.000,- dan telah disahkan pada perjanjian kinerja tahun 2024 pada tanggal 15 Januari 2024.

**Table 21. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Jakarta per Kegiatan sampai dengan Bulan September 2024**

Kode	Kegiatan	Pagu	Realisasi S/D Desember 2023	%
2350	Pemantauan dan Operasi Armada	Rp. 14,152,064,000	Rp. 7,238,805,550	51,15%
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp. 754,000,000	Rp. 379,795,069	50,37%
2352	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Kelautan	Rp. 2,111,415,000	Rp. 1,045,289,804	49,51%
2353	Peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Perikanan	Rp. 2,211,790,000	Rp. 1,271,499,985	57,49%
2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	Rp. 22,993,032,000	Rp. 16,567,115,775	72,05 %
	<b>Total</b>	<b>Rp. 42,222,301,000</b>	<b>Rp. 26,502,506,183</b>	<b>62,77 %</b>



#### 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKJ) periode triwulan III tahun 2024 menyajikan capaian kinerja Pangkalan PSDKP Jakarta selama bulan Januari – Maret 2024. yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisa dan evaluasi untuk menilai keberhasilan dalam setiap triwulan berjalan dan triwulan sebelumnya. Pangkalan PSDKP Jakarta sebagian besar telah memenuhi seluruh target IKU yang ditentukan pada triwulan III dengan jumlah 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Terdapat 1 (satu) IKU yang tidak mencapai target yaitu IKU “Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)”. IKU tidak tercapai dikarenakan belum dilaksanakannya kegiatan pengawasan SDK pada patroli speedboat. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pangkalan PSDKP Jakarta sampai dengan Maret tahun 2024 sebesar 107,39.

#### 4.2 Rekomendasi

Melibatkan Tim SDK dalam pelaksanaan kegiatan patroli speedboat pada triwulan III, sehingga capaian pada IKU “Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)” tercapai.

#### 4.3 Tindak Lanjut

<b>Rekomendasi Triwulan sebelumnya</b>	<b>Tindak Lanjut</b>
Tidak ada permasalahan yang terjadi selama pemenuhan kinerja pada periode triwulan I sehingga tidak ada rekomendasi pada triwulan ini	Tidak ada tindak lanjut yang terjadi karena tidak ada rekomendasi pada periode triwulan I